

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia maka semakin banyak pula perusahaan yang mulai *go public*. Haryati & Cahyati (2015) mendefinisikan perusahaan *go public* sebagai perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya di bursa saham. Semua perusahaan dapat menjadi perusahaan *go public*, termasuk perusahaan yang menggunakan prinsip syariah. Perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada investor.

SFAC No. 1 dalam paragraf ke-34, FASB menetapkan tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor maupun potensial dan pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan lainnya dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian aliran kas di masa yang akan datang mengenai sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut dan perubahannya. Hal tersebut menggambarkan bahwa informasi yang menggambarkan keuangan dan keadaan ekonomi yang mempengaruhi perusahaan disajikan dalam laporan keuangan, di mana pihak manajemen memiliki hak prerogatif untuk mengungkapkan data dalam laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi kuantitatif yang dibuat oleh perusahaan (Haryati & Cahyati, 2015). Dalam laporan keuangan hal penting yang sering menjadi sorotan utama adalah laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba yang besar sering dinilai dalam kondisi yang baik. Kondisi yang demikian yang kemudian akan menarik investor untuk menginvestasikan dananya atau mempertahankan investor yang telah ada.

Kondisi di mana perusahaan ingin dinilai baik oleh masyarakat terutama investor mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Haryati & Cahyati, 2015). *Earnings management* bisa terjadi di berbagai perusahaan, baik di sektor perdagangan, manufaktur maupun sektor industri, dan juga jasa. Bahkan perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah pun diindikasikan melakukan manajemen laba (Haryati & Cahyati, 2015).

Penelitian tentang *earnings management* sudah dimulai sejak diperkenalkannya konsep pemisahan antara *ownership* dan *control* oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*) yang dapat menimbulkan terjadinya manajemen laba (Isbanah, 2012). Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan tentang kontrak atau hubungan antara agen (manajemen) dan *principal* (pemilik), dengan adanya kontrak tersebut *principal* memerlukan bantuan dari agen untuk menjalankan usahanya dikarenakan *principal* tidak dapat menjalankan sendiri usahanya (Haryati & Cahyati, 2015).

Manajemen laba timbul sebagai dampak dari konflik keagenan karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen (Kusumawati, Sari, & Trisnawati, 2013). Manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak, manajemen juga lebih cepat mendapatkan informasi tentang kondisi perusahaan daripada pemegang saham/pemilik. Hal ini memungkinkan manajemen melakukan praktik akuntansi dengan berorientasi pada angka laba yang akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba yang dilaporkan sehingga menyebabkan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Manajemen laba juga terjadi ketika manajemen menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam pencatatan transaksi untuk mengubah laporan keuangan baik menyesatkan beberapa *stakeholder* tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan (Subekti, Kee dan Ahmad, 2010 dalam Trisnawati et al., 2016)

Menurut Kusumawati et al., (2013) manajemen laba (*earnings management*) merupakan fenomena yang sulit untuk dihindari karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Pada dasar akrual, pendapatan dan biaya diakui berdasar hak dan kewajibannya bukan pada penerimaan atau pengeluaran kas (Sunarto & Sundarta, 2015). Pendapatan dan biaya diakui sekarang meskipun transaksi kas baru terjadi pada periode selanjutnya. Dari dasar tersebut, laba yang dilaporkan terdiri dari dua komponen yaitu akrual dan kas. Penelitian ini menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi *earnings management*.

Menurut Barus & Setiawati, (2015); Kusumawati et al., (2013) dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun sisi lain penggunaan akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Jadi, manajemen akan memilih kebijakan tertentu agar dapat memberikan pelaporan laba yang baik dalam laporan keuangan.

Earnings management oleh sebagian kalangan akademis dianggap sebagai *profesional judgement* atas laporan keuangan. Tindakan ini dapat menyesatkan pemakai laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang tidak akurat. Bahkan terkadang merupakan penyebab terjadinya tindakan ilegal, misalnya penyajian laporan keuangan yang terdistorsi atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Beberapa fenomena mengenai *earnings management* terjadi pada beberapa perusahaan besar di Indonesia, yaitu kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) dan PT Bank Bukopin Tbk (BBKP).

Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, ternyata sejak bulan Juni 2015 keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sudah dimanipulasi. GIAA diduga melakukan perubahan dalam laporan keuangan agar terlihat sehat. Dugaan perubahan ini terlihat dari salinan percakapan sebuah grup Whatsapp (baca: WA).

Di dalam salinan percakapan itu sangat terlihat jajaran direksi atau BOD memberikan perintah kepada kepala unit dan kepala bagian *accounting* PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memundurkan semua pembayaran hutang. Pemunduran ini dimaksudkan untuk membuat laporan keuangan menjadi bagus. Dalam bat pertama, direktur keuangan (DF) menugaskan untuk melakukan identifikasi biaya-biaya non rutin bulan Juni 2015, agar dapat direvisi lebih maju pada bulan Juli atau Agustus 2015. Namun cari ini dengan syarat tidak mengganggu operasional secara signifikan. Selanjutnya, jika kesepakatan pengunduran hutang telah disepakati terutama dalam bentuk perjanjian, maka bisa direvisi untuk ditandatangani ulang dan akan efektif bulan Juli atau Agustus. Di sini bukan hanya negoisasi pembayaran saja melainkan efektivitas perjanjian dan transaksinya. Di akhir percakapan, sangat tegas pernyataan yang dikatakan di dalam WA tersebut, seluruh karyawan yang ditugaskan perintah tersebut yang tidak melaksanakannya, maka akan mendapatkan teguran keras dari jajaran direksi. (<https://energyworld.co.id> diposting pada Tanggal 12 Maret 2016, diakses pada tanggal 4 April 2019, pukul 13.40 WIB).

Selanjutnya ialah kasus PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) pada tahun 2015. Dalam kasus ini Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan indikasi salah saji dalam laporan keuangan INVS periode September 2014. Dalam keterbukaan informasi INVS bertanggal 25 Februari 2015, ada delapan item dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai aset tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, dan jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha. Selain itu BEI juga menyatakan manajemen INVS salah saji item pembayaran kas kepada karyawan dan penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas. Pada periode semester pertama 2014 pembayaran gaji pada karyawan Rp 1,9 triliun. Namun pada kuartal ketiga 2014 angka pembayaran gaji pada karyawan turun menjadi Rp 59 miliar.

Sebelumnya, manajemen INVS telah merevisi laporan keuangannya untuk periode Januari hingga September 2014. Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai pada laporan keuangan mengalami perubahan nilai, salah contohnya adalah penurunan nilai aset tetap menjadi Rp 1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya diakui sebesar Rp 1,45 triliun. INVS juga mengakui laba bersih per saham berdasarkan laba periode tahun berjalan. Praktik ini menjadikan laba bersih per saham INVS tampak lebih besar. Padahal, seharusnya perseroan menggunakan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (<http://www.bareksa.com>, diposting pada tanggal 25 Februari 2015, diakses pada tanggal 4 April 2019, pukul 14.00 WIB).

Fenomena *earnings management* yang terbaru yakni Bank Bukopin Tbk (BBKP) merevisi laporan keuangan yang diduga dipercantik. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) merevisi laporan keuangan tiga tahun terakhir, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Revisi tersebut diakibatkan karena modifikasi kartu kredit yang tidak semestinya. Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp 1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 316,88 miliar (<https://finance.detik.com> diposting pada Tanggal 03 Mei 2018, diakses pada tanggal 4 April 2019, pukul 15.00 WIB).

Earnings management yang dilakukan oleh pihak manajemen tidak hanya merugikan para investor tetapi juga merugikan semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Pihak-pihak itu antara lain karyawan, pemegang saham, kreditor, pemerintah dan masyarakat. Karena semua pihak mengandalkan informasi dari laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen. Oleh karena itu, informasi di dalam laporan keuangan harus memiliki kriteria tertentu agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015 telah ditetapkan kriteria utama yang harus dimiliki oleh informasi keuangan

perusahaan, yaitu relevan dan *reliable* (keandalan). Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan atau mengubah pengharapan para pengambil keputusan dan keputusan tersebut dapat dikatakan *reliable* apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai informasi tergantung dengan informasi tersebut (Haryati & Cahyati, 2015).

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab *earnings management* (Kusumawati et al., 2013). Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik dan *stakeholder* lainnya. Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer karena manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba (*earning*) atau prestasi suatu perusahaan sehingga tidak mengherankan bila manajer sering berusaha untuk menonjolkan prestasinya melalui tingkat keuntungan atau laba yang dicapai (Trisnawati et al., 2016). Semakin besar asimetri informasi yang terjadi maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya manajemen laba.

Melihat banyaknya celah yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam mengelola laba, maka diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat menyejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, yaitu manajer dan pemegang saham. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) (Barus & Setiawati, 2015). Karena mekanisme *corporate governance* memiliki kemampuan dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang lebih berkualitas termasuk kualitas laba (Isbanah, 2012). Dengan adanya mekanisme *corporate governance* maka akan mengurangi aktivitas *earnings management* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Asward & Lina, 2015).

Corporate governance sebagai salah satu mekanisme *monitoring* yang bertujuan untuk menyalurkan berbagai kepentingan, diharapkan dapat meminimalkan perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Barus & Setiawati (2015) kepemilikan Institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga semakin besar kepemilikan saham oleh institusional, maka semakin besar juga kemungkinan yang dapat menghalangi terjadinya manajemen laba. Menurut Kusumawati et al. (2013) dengan memperbesar kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen (*manajerial ownership*) maka praktik *earnings management* dapat diminimumkan. Menurut Kusumawati et al. (2013) keberadaan komite audit dapat mengurangi aktivitas manajemen dalam melakukan *earnings management*.

Melihat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmayanti et al., 2017; Nariastiti & Ratnadi, 2014; Susanti, 2016; dan Wicaksono, 2015 menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *earnings management*. Sedangkan, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Risdawaty & Subowo, 2015; Barus & Setiawati, 2015; dan Kusumawati et al., 2013 menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *earnings management*.

Hasil penelitian mengenai mekanisme *corporate governance* terdiri dari beberapa komponen, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Penelitian yang dilakukan oleh Asward & Lina, 2015; Hidayat, 2016; dan Kusumawati et al., 2013 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *earnings management*. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Barus & Setiawati, 2015; Darmayanti et al., 2017; Haryati & Cahyati, 2015; Kusumawati et al., 2013; dan Nariastiti & Ratnadi, 2014 menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *earnings management*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asward & Lina, 2015 tentang kepemilikan manajerial menunjukkan hasil positif terhadap *earnings management*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti et al., 2017; Hidayat, 2016; Mahariana & Ramantha, 2014; Kusumawati et al., 2013; Nariastiti & Ratnadi, 2014; Rokhmah, 2012; dan Susanti, 2016 yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *earnings management*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asward & Lina, 2015; Haryati & Cahyati, 2015; Hidayat, 2016; dan Suryanto, 2014 komite audit berpengaruh positif terhadap *earnings management*. Sedangkan hasil penelitian Kusumawati et al., 2013; dan Nariastiti & Ratnadi, 2014 komite audit tidak berpengaruh terhadap *earnings management*.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu untuk mengetahui *earnings management* pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tahun 2015-2018, di mana beberapa penelitian di Indonesia sebelumnya belum banyak yang mengkaji mengenai *earnings management* pada *Jakarta Islamic Index* (JII). Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini diberi judul **Pengaruh Asimetri Informasi dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015 – 2018**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2015-2018?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2015-2018?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2015-2018?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2015-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut dalam perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2015-2018 :

1. Pengaruh asimetri informasi terhadap *earnings management*.
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *earnings management*.
3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *earnings management*.
4. Pengaruh komite audit terhadap *earnings management*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini, maka diharapkan terdapat manfaat bagi, yakni :

1. Bagi Ilmu Akuntansi

Untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan perubahan agar keberadaan ilmu akuntansi dapat digunakan dalam memberi nilai tambah seiring perkembangannya.

2. Bagi Perusahaan

Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami mekanisme dan model-model *corporate governance* serta praktik manajemen laba, sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.

3. Bagi Investor

Untuk dapat digunakan sebagai dasar masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham, terutama dalam menilai kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

4. Bagi Pembuat Kebijakan

Untuk membuat suatu pedoman pengungkapan informasi akuntansi yang lebih akomodatif yang sesuai dengan kondisi pasar modal syariah di Indonesia.